

MODEL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NILAI DI PERGURUAN TINGGI

Oleh; Agus Salam Rahmat

1. Pengertian Perguruan Tinggi

Istilah Perguruan Tinggi yang digunakan untuk lapisan ke-2, identik dengan istilah Perguruan Tinggi yang disebut dalam Peraturan Pemerintah No.30 th 1990, yaitu organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Fungsi-fungsi utama Perguruan Tinggi adalah :

1. Membina kualitas hasil dan kinerja Perguruan Tinggi, agar dapat memberi sumbangan yang nyata kepada perkembangan IPOLEKSOSBUD di masyarakat. Untuk dapat melaksanakan pembinaan kualitas yang baik, secara periodik Perguruan Tinggi menyelenggarakan evaluasi-diri yang melibatkan semua Unit Akademik Dasar. Evaluasi-diri sewajarnya dianggap sebagai perangkat manajemen Perguruan Tinggi yang utama, karena setiap pengambilan keputusan harus dapat mengacu pada hasil evaluasi-diri.
2. Merencanakan pengembangan Perguruan Tinggi menghadapi perkembangan di masyarakat. Rencana Strategis menjangkau waktu pengembangan 10 tahun, seyogyanya dapat dibuat oleh Perguruan Tinggi. Dari Rencana Strategis tersebut, dapat dijabarkan Rencana Operasional Lima Tahunan dan Rencana Operasional Tahunan, dan yang terakhir ini mengkaitkan pada Memorandum Program Koordinatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam arti bahwa bagian-bagian Rencana Operasional Tahunan yang memerlukan anggaran pembangunan, dapat diajukan sebagai Daftar Isian Proyek.
3. Mengupayakan tersedianya sumberdaya untuk menyelenggarakan tugas-tugas fungsional dan rencana perkembangan Perguruan Tinggi.

Sumberdaya diupayakan, tidak hanya Otoritas Pusat, tetapi juga dari pihak-pihak lain melalui kerjasama, kontrak penelitian, penyediaan pendidikan dan pelatihan khusus, sumbangan dan lain-lain.

4. Menyelenggarakan pola manajemen Perguruan Tinggi, yang dilandasi Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi, dengan sasaran utama adanya suasana akademik yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan fungsional pendidikan tinggi.

http://www.dikti.org/kpptjp/BAB_3.htm

Perguruan Tinggi merupakan wadah bagi masyarakat kampus. Sebagai suatu organisasi maka perguruan tinggi mempunyai (1) struktur, (2) aturan penyelesaian tugas, yang mencakup pembagian tugas antar kelompok fungsional dan antar warga dalam kelompok yang sama, (3) rencana kegiatan, dan (4) tujuan. Tujuan dibimbing oleh asas dan membimbing rencana kegiatan. Struktur dan aturan penyelesaian tugas menjadi prasarana pencapaian tujuan dan sekaligus mencerminkan asas.

Perguruan tinggi sebagai masyarakat tidak terlepas dari suatu masyarakat besar yang menjadi lingkungannya (pengertian atau ungkapan universal), atau yang menjadi induknya (pengertian atau ungkapan paternalistik). Dalam hal Indonesia, yang kebanyakan warganya sangat cenderung pada paternalisme, masyarakat perguruan tinggi menjadi anak masyarakat besar Indonesia. Penempatan dan penyesuaian diri masyarakat kampus pada masyarakat besar Indonesia lebih banyak berlangsung secara formalistic (melalui ketentuan, peraturan, undang-undang yang bermaksud baik) daripada secara ekologi. Fakta ini berpengaruh jelas pada penjabaran asas menjadi tujuan dan selanjutnya pada penjabaran tujuan menjadi tugas pokok. Barangkali pengaruh fakta ini sampai pula mencapai asas.

Hakekat perguruan tinggi (di Indonesia) dapat kiranya tercermin pada hal-hal berikut:

1. merupakan pelaksana pemerintah dalam bidang pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah.

2. bertugas pokok melestarikan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari:
 - 3.1 pengembangan pendidikan dan pengajaran
 - 3.2 Penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni.
 - 3.3 Pengabdian pada masyarakat
4. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya.

www.soil.faperta.ugm.ac.id/

Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah, institut atau universitas. Program pendidikan dapat berupa diploma (D-1, D-2, D-3, D-4), sarjana (S-1), magister (S-2), spesialis (SP 12), dan doctor (S-3) yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi.

1. Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi

Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan umum mensosialisasikan nilai dalam rangka konsensus nilai. Karakteristik pendidikan umum adalah tujuannya lebih menyangkut moralitas dan penyikapan, bahan ajar berupa nilai-nilai, dan metode yang dipakai menuntut pelibatan emosi, intelektualitas, dan sosial pembelajar

Terdapat sejumlah literature yang mempersoalkan kelayakan pendidikan ilmu dalam berbagai bentuknya (Hall & Kevies, 1982) dan yang lain yakin bahwa asumsi Pendidikan Umum perlu mendapat kritik radikal (Lousi, 1981).

Secara teoritis Pendidikan Umum sebagai pendidikan nilai bertujuan untuk melengkapi pendidikan yang selama ini hanya menekankan pada kemampuan **kognitif (IQ) semata**, dengan kemampuan emosional (EQ) dan kemampuan spiritual (SQ), agar menelorkan sarjana yang paripurna; matang secara nalar, emosional, maupun spiritual dan menjadi warga negara yang baik. Dari hasil kajian awal dan juga landasan teori diketahui bahwa pengimplementasian pendidikan secara umum masih menekankan pada transfer pengetahuan semata (transfer of knowledge) yang menuntut hanya factual judgement. Penjabaran nilai-nilai yang diemban dalam setiap matakuliah tidak jelas. Banyak dosen tidak menguasai konsep-konsep dan model pembelajaran nilai.

Tujuan Pendidikan Umum/Pendidikan Nilai

Program Magister Pendidikan Umum bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan (a) melakukan pengkajian tentang pribadi manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa, terintegrasi dan terdidik seperti seperti tercantum dalam tujuan pendidikan nasional ;(b) mengembangkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan berbagai konsep , teori, dan metode baru dalam pendidikan nilai dan watak;(c) merancang dan melaksanakan pembinaan sikap dan nilai pada peserta didik; dan (d) mengaplikasikan teori-teori pendidikan ke dalam praktik pendidikan.

Program Doktor Pendidikan Umum bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu; (a) menampilkan gagasan-gagasan kreatif yang dapat diterapkan dalam mengembangkan pendidikan pada umumnya dan pendidikan nilai dan watak pada khususnya; (b) melakukan kajian dan penelitian mandiri sehingga mampu menghasilkan temuan-temuan yang bernilai tinggi bagi pengembangan teori dan atau praktek pendidikan nilai dan watak pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah dengan dilandasi penguasaan yang kokoh terhadap ilmu pendidikan. (Buku Informasi UPI 2003;113)

Misi dan Visi Pendidikan Umum

Secara rasional eksistensi Pendidikan Umum bertitik tolak pada: (1) prediksi tantangan Indonesia abad 21, (2) tantangan nasional yang actual, (3) kontribusi pendidikan terhadap pembangunan nasional.

Globalisasi

Globalisasi dan “desa buana yang memandang seluruh umat manusia sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa adanya pemisahan dalam susunan umat sedunia berimplikasi luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ideology, politik, keamanan, social budaya, maupun ekonomi. Batas-batas politik, ekonomi social budaya antar bangsa menjadi samara-samar dan memudar. Selain bermakna positif, perkembangan ini juga bermakna negative karena dapat mengancam integritas dan identitas nasional. Dapat disadari bahwa dalam era persaingan global, kelemahan kualitas sumber daya manusia merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia yang terkenal dengan kemajemukan masyarakat dan kualitasnya.

Tntangan Nasional Yang Aktual

Seharusnya kita dapat mewedahi dan menjawab tantangan actual dalam skala nasional melalui:

- (1) kepribadian dan integrasi nasional. Kontak budaya dan perubahan orientasi budaya menimbulkan dampak terhadap tata nilai masyarakat yang sedang menumbuhkan identitasnya sendiri sebagai bangsa. Semuanya itu menghadapi maslaah urgen berupa upaya memperkuat kepribadian nasional.
- (2) kewaspadaan nasional dan pembudayaan Pancasila. Dalam menyerap informasi dan nilai budaya yang selaras sangat membutuhkan adanya kewaspadaan dan kuatnya kepribadian bangsa.
- (3) Kontribusi pendidikan terhadap pembangunan. Sektor ini memberikan makna bahwa keterkaitan pendidikan dengan program pembangunan dan keterikatan program PU dengan pembangunan di bidang pendidikan. Dalam konteks kebudayaan, pendidikan tidak hanya sekedar upaya pewarisan kebudayaan. Phenix (1964) mengemukakan bahwa jika pendidikan hnaya pewarisan kebudayaan, mak awajarlah bila kelemahan

dalam kebudayaan akan ditemukan juga dalam pendidikan dan generasi yang mendapat pendidikan tersebut.

Pengajaran

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, hendaknya pendidikan umum memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

- (1) Prinsip Idealisme di atas dengan tetap mempertahankan program pengajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama, dengan ditekankan pada aspek kebersamaan, keberagaman, dan kebangsaan.
- (2) Prinsip pragmatisme dengan memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi masing-masing untuk mengemukakan program Pendidikan Umum yang cocok untuk daerah masing-masing. Mengacu pada hal tersebut pendidikan umum dapat mencakup disiplin ilmu seperti agama untuk biologi pada fakultas IPA, atau moralitas hukum untuk fakultas hukum. Sehingga program Pendidikan Umum itu mendasari program spesialisasi.
- (3) prinsip progresivisme yang memperhatikan kebutuhan mahasiswa. Seperti program Pendidikan Umum mencakup mata kuliah metode penelitian, ilmu computer, bahasa asing (Arab, Jepang, Perancis, Jerman, dll) disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. MKU (mata kuliah umum) diniati sebagai wadah pendidikan umum (*general education*) atau *liberal education* agar mahasiswa tidak berpikiran sempit seolah-olah prodi mereka itu segala-galanya demi karier di masa mendatang. MKU memperluas wawasan, memperkaya spesialisasi (prodi), dan mempersiapkan belajar sepanjang hayat. Mendasari MKU adalah filsafat bahwa pendidikan itu tidak sekadar untuk mendapatkan pekerjaan (*careerism*), tetapi untuk menegakkan humanisme --atau dalam bahasa pendidikan kita-- demi terbentuknya insan kamil atau manusia seutuhnya. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/>

Organisasi Kelembagaan

Secara kelembagaan, Pendidikan Umum bernaung dalam dua bentuk, yaitu Unit Pelaksana Teknis suatu wadah yang di luar fakultas dan berada di bawah rektor langsung dan berbentuk jurusan dan sering diragukan pengertiannya karena tidak memiliki mahasiswa tertentu. Untuk menghadapi persoalan ini, jika ditinjau dari kepentingan karier akademis, psikologis, tridharma PT, kesejarahan dan lain-lain, beberapa PT (termasuk IKIP Malang) tetap menghendaki bentuk jurusan.

3. Pendidikan Nilai dan Pengembangannya

Makna Pendidikan Nilai berkaitan dengan masalah baik pertimbangan moral maupun non-moral tentang suatu objek; termasuk etika dan estetika. Tujuan pendidikan nilai adalah untuk membantu siswa mengeksplorasi nilai-nilai yang ada melalui pengujian yang kritis agar mampu meningkatkan kualitas pikiran dan perasaan siswa. Pendidikan nilai paling sedikit meliputi empat dimensi, yaitu identifikasi inti nilai-nilai personal dan sosial; penemuan filosofis dan rasional tentang inti tersebut; respon afektif dan emotif terhadap inti tersebut; pembuatan keputusan berkaitan dengan inti berdasarkan penemuan dan respon. <http://sps.upi.edu/v2/>

Konsep Pendidikan Nilai

Pertama, perlu diperjelas dahulu mengenai konsep nilai dan norma. Bertens mengungkapkan bahwa nilai adalah sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, sesuatu yang baik (Adimassana; 2001). Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Piet G.O. bahwa konsep nilai dalam arti sifat yang berharga menurutnya adalah sifat dari suatu hal, benda, atau pribadi yang memenuhi kebutuhan elementer manusia yang memang serba butuh atau menyempurnakan manusia yang memang tak kunjung selesai dalam pengembangan dirinya secara utuh, menyeluruh, dan tuntas (Piet GO, 1990). Menurut Sinurat, nilai dan perasaan tidak dapat dipisahkan, keduanya saling mengandaikan, perasaan adalah aktifitas psikis di mana manusia menghayati nilai (Adimassana; 2001). Yang

bernilai menimbulkan perasaan positif dan yang tidak bernilai menimbulkan perasaan negatif. Selaras dengan pemikiran-pemikiran diatas, Hans Jonas mengatakan bahwa nilai itu the addresse of a yes (Adimassana; 2001). Jadi, nilai adalah sesuatu yang selalu kita setujui. Sementara itu, norma adalah aturan atau patokan baik tertulis atau tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman bertindak. Bila tiap manusia punya suatu sistem nilai dalam dirinya, dan sistem nilai itu dihidupi dan dijadikan pedoman hidup, berarti manusia itu sudah memenuhi kriteria manusia purnawan.

Tujuan pendidikan nilai secara global adalah mencapai manusia yang seutuhnya; menjadi manusia purnawan, jika menggunakan bahasa Driyarkara. Pendidikan nilai hendak mencapai manusia yang sehat; mencapai pribadi yang terintegrasi jika menggunakan bahasa Philomena Agudo. Integrasi pribadi memadukan semua bakat dan kemampuan daya manusia dalam kesatuan utuh menyeluruh. Pembawaan fisik, emosi, budi, dan rohani diselaraskan menjadi kesatuan harmonis. GBHN 1988 Bab II B mendukung pernyataan ini : Landasan Pembangunan Nasional: “Berdasarkan pola pikiran bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya.....” Jadi, pendidikan nilai itu manifestasi non scholae sed vitae discimus. <http://krisnaster.blogspot.com>

4.Pengembangan Pendidikan Nilai di PT

Pendidikan nilai bukan saja perlu karena dapat mengembalikan filosofi dasar pendidikan Indonesia yang seharusnya non scholae sed vitae discimus, namun juga perlu karena Indonesia, sebagai negara Pancasila, pada hakekatnya, menuntut pendidikan nilai karena ciri khasnya justru terletak dalam komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan negara. Dunia masa kini menghadapi suatu perubahan budaya akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang juga membawa dampak negatif berupa lunturnya nilai-nilai yang vital, misalnya, nilai kegotong-royongan, nilai kesopanan, nilai kesusilaan. Maka, harus ada usaha reservasi nilai-nilai kehidupan supaya tidak punah. Dalam hal ini, pendidikan nilai berperan penting.

Formulasi substansi dan materi pengajaran pendidikan moral yang lama, terlalu berpola deduktif, khas kebijakan politik Orde Baru yang ingin mengontrol semua bidang kehidupan. Pemaknaan nasionalisme, misalnya, jarang sekali dikaitkan dari sudut pandang kelompok- kelompok masyarakat yang begitu beragam. Nasionalisme disajikan dalam bentuknya yang negara-sentris. Separatisme dimaknai secara hitam-putih tanpa dilihat dari perspektif lebih luas. Sementara itu, nilai-nilai seperti kejujuran, ketulusan, kebajikan, dan semacamnya, banyak tampil sekadar semacam petuah tanpa eksplorasi mendalam, eksplisit maupun implisit.

MOMENTUM lahirnya kebijakan otonomi daerah, yang diatur dalam UU No. 22/1999, seperti memberi napas baru bagi dunia pendidikan kita yang terengah-engah. Berdasar undang-undang itu, wewenang terbesar bidang pendidikan ada di tangan pemerintah daerah, baik kebijakan menyangkut alokasi budget maupun kebijakan yang bersifat strategis di bidang kurikulum. Apalagi dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka perangkat pemulihan daya pendidikan semakin tersedia.

Dari perspektif otonomi pendidikan ini, menarik untuk didiskusikan peluang pengembangan pendidikan moral atau pendidikan nilai di PT yang berbasis sumber daya atau khazanah setempat, yakni yang bisa berupa sejarah atau pemikiran yang bersumber dari kearifan lokal. Asumsi dasarnya adalah, dalam warisan sejarah dan pemikiran lokal itu ada sejumlah etos dan nilai moral yang inheren dan betul-betul hidup dalam masyarakat, sehingga ada keterjalinan yang cukup kuat antara peserta didik dengan kurikulum yang disajikan. <http://kompas.com/>

Pendidikan Nilai di PT selama ini bertumpu pada mata kuliah-mata kuliah MKDU (mata kuliah dasar umum) yang berubah nama MKU (mata kuliah umum) yang terdiri atas pendidikan moral Pancasila (kewarganegaraan), pendidikan agama, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, olah raga, kewiraan dan PLSBT.

Pendidikan Agama Islam (PAI) atau Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI) bagi umat Islam bisa dijadikan core dalam pengembangan Pendidikan Umum di perguruan tinggi yaitu dengan mengembangkan Ilmu aqidah, syariah, ibadah, muamalah terutama akhlakul karimah.

Pendidikan agama di PT umum rata-rata mempunyai bobot dua sks, dan ada beberapa perguruan tinggi umum yang memberi bobot empat sks yang terdiri dari dua sks pembekalan ilmu agama dan dua sks lagi berupa seminar pendidikan agama.